



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**KECAMATAN
PELAIHARI**



kecamatan_pelaihari



Kecamatan Pelaihari



kecpelaihari.tanahlautkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan HidayahNya jualah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pelaihari Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran, maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Pelaihari dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif.

Renstra-PD Kecamatan Pelaihari memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pelaihari

Camat Pelaihari,

AGUS SETIYO, SSTP.MM
Pembina Tk. I/V.b
NIP. 19850808 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	5
2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PELAIHARI	5
2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PELAIHARI	10
2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PELAIHARI	14
2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN KECAMATAN PELAIHARI	15
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PELAIHARI	15
2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN PELAIHARI	15
2.2.2 ISU STRATEGIS.....	16
BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	18
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PELAIHARI	18
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	19
BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	22
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	22
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB V PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Per April 2025.....	10
Tabel 2.2. PNS Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.3. Pegawai Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan Berdasarkan Jabatan Struktural Per April 2025.....	11
Tabel 2.4. Pegawai Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan Berdasarkan Diklat Penjenjangan Per April 2025.....	11
Tabel 2.5. Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029	11
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelaihari	15
Tabel 2.7. Teknik Menyimpulkan Isu Perangkat Daerah	16
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Sasaran dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	19
Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Kecamatan Pelaihari.....	20
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pelaihari.....	20
Tabel 3.4. Locus Kecamatan Pelaihari.....	21
Tabel 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	22
Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Renstra Kecamatan Pelaihari...	23
Tabel 4.3. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Pelaihari	26
Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	34
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kecamatan Pelaihari	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari.....	9
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	18
Gambar 3.2. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah memberikan peran yang cukup besar bagi Kecamatan dalam menyusun perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*).

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang nantinya akan disusun selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pelaihari Tahun 2025- 2029.

Renstra Kecamatan Pelaihari Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2030. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pelaihari Tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Pelaihari Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Pelaihari yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pelaihari yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
6. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Pelaihari dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pelaihari untuk Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Kecamatan Pelaihari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
- b. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pelaihari untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran daerah di Kecamatan Pelaihari.
- c. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Pelaihari serta pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan Kecamatan Pelaihari.
- d. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Kecamatan Pelaihari.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 000.7.3/41/P2EPD/Bapperida tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sistematika penulisan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- Bab III : Tujuan, Sasaran dan Arah Strategis Kebijakan
- Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab V : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PELAIHARI

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

1. Camat

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada seksi-seksi lain di lingkungan Kecamatan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/penataan barang;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- i. Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugasnya;
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Pelaihari ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- b. Melaksanakan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan ketertiban;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan.
- c. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

6. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan

mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan;
- b. Menyelenggarakan program kegiatan hubungan masyarakat kecamatan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
- e. Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, struktur organisasi Kecamatan Pelaihari terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat

Adapun struktur organisasi kelurahan terdiri dari :

- Lurah
- Sekretaris Lurah
- Kasi Pembangunan
- Kasi Kemasyarakatan
- Kasi Pemerintahan



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari

2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PELAIHARI

Sumber daya manusia di Kecamatan Pelaihari Per April 2025 berjumlah 16 orang Pegawai Negeri Sipil. Selain PNS juga ada 3 orang PPPK dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 5 (lima) orang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pelaihari mempunyai 5 (lima) Kelurahan didukung oleh sebanyak 87 orang pegawai, terdiri dari 65 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 orang PPPK dan 17 orang pegawai tidak tetap.

Jumlah PNS Kecamatan Pelaihari dan Kelurahan dibedakan berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, pejabat struktural dan penjenjangan yang ada di Kecamatan Pelaihari pada Tahun 2024 adalah :

1. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Per April 2025

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I	IV/b	2
2	Pembina	IV/a	-
3	Penata Tingkat I	III/d	3
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
5	Penata Muda	III/a	2
6	Pengatur Tingkat I	II/d	1
7	Pengatur	II/c	2
8	PPPK	VIII	1
7	PPPK	VII	2
8	PPPK	V	5
Jumlah			17

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari 2024

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. PNS Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	5
2.	S1	34
3.	D3	13
4.	SMA	2
Jumlah		71

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari April 2025

3. Berdasarkan Pejabat Struktural

Tabel 2.3. Pegawai Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan Berdasarkan Jabatan Struktural Per April 2025

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	9
4.	Eselon IV b	22
Jumlah		33

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari April 2025

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.4. Pegawai Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan Berdasarkan Diklat Penjenjangan Per April 2025

No	Diklat Struktural	Jumlah pegawai
1.	DIKLAT PIM TK. III	2
2.	DIKLAT PIM TK.IV	20
Jumlah		22

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari April 2025

Adapun Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan adalah sebagai berikut

Tabel 2.5. Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi					
				Pegawai yang Dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Seluruhnya	71	159	91	5	5	3	9	2
	KECAMATAN PELAIHARI	19	44	26	0	1	0	7	0
1.	Camat	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	Sekretaris	1	1	1	0	0	0	0	0
3.	Kasi Tata Pemerintahan	1	1	0	0	0	0	0	0
4.	Kasi Pelayanan	1	1	0	0	0	0	0	0
5.	Kasi Trantib	1	1	0	0	1	0	0	0
6.	Kasi PMD	0	1	1	0	0	0	0	0
7.	Kasi Kemasyarakatan	1	1	0	0	0	0	0	0
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	1	0	0	0	0	0	0
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0	0	0	0	0	0
10.	Penata Layanan Operasional	1	1	0	0	0	0	0	0
11.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	3	2	0	0	0	0	0
12.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	5	3	0	0	0	0	0

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi					
				Pegawai yang Dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.	Pengelola Layanan Operasional	2	2	0	0	0	0	0	0
14.	Pengolah Data dan Informasi	1	6	5	0	0	0	0	0
15.	Pengadministrasi Perkantoran	3	8	5	0	0	0	7	0
16.	Operator Layanan Operasional	0	1	1	0	0	0	0	0
17.	Pranata Komputer Muda	0	1	1	0	0	0	0	0
18.	Pranata Komputer Pertama	0	1	1	0	0	0	0	0
19.	Pranata Komputer Penyelia	0	1	1	0	0	0	0	0
20.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0	1	1	0	0	0	0	0
21.	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	0	0	0	0	0	0
22.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0	1	1	0	0	0	0	0
23.	Penata Laksana Barang Penyelia	0	1	1	0	0	0	0	0
24.	Penata Laksana Barang Mahir	0	1	1	0	0	0	0	0
25.	Penata Laksana Barang Terampil	0	1	1	0	0	0	0	0
	KELURAHAN PELAIHARI	9	23	15	0	1	0	0	0
1.	Lurah	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	Sekretaris	1	1	0	0	0	0	0	0
3.	Kasi Pemerintahan	1	1	0	0	0	0	0	0
4.	Kasi Kemasyarakatan	1	1	0	0	1	0	0	0
5.	Kasi Pembangunan	1	1	1	0	0	0	0	0
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	1	3	2	0	0	0	0	0
7.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	2	1	0	0	0	0	0
8.	Pengelola Data dan Informasi	0	4	4	0	0	0	0	0
9.	Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	0	0	0	0	0
10.	Pengadministrasi Perkantoran	2	5	3	0	0	0	0	0
11.	Penata Laksana Barang Penyelia	0	1	1	0	0	0	0	0
12.	Penata Laksana Barang Mahir	0	1	1	0	0	0	0	0
13.	Penata Laksana Barang Terampil	0	1	1	0	0	0	0	0
	KELURAHAN ANGSAU	9	23	15	2	0	0	0	1
1.	Lurah	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	Sekretaris	1	1	0	0	0	0	0	0
3.	Kasi Pemerintahan	1	1	0	0	0	0	0	0
4.	Kasi Kemasyarakatan	1	1	0	0	0	0	0	1
5.	Kasi Pembangunan	1	1	1	0	0	0	0	0
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	0	3	3	0	0	0	0	0
7.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	2	2	0	0	0	0	0
8.	Pengelola Data dan Informasi	1	4	3	1	0	0	0	0
9.	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0	1	0	0	0	0

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi					
				Pegawai yang Dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.	Pengadministrasi Perkantoran	2	5	3	0	0	0	0	0
11.	Penata Laksana Barang Penyelia	0	1	1	0	0	0	0	0
12.	Penata Laksana Barang Mahir	0	1	1	0	0	0	0	0
13.	Penata Laksana Barang Terampil	0	1	1	0	0	0	0	0
	KELURAHAN SARANG HALANG	10	23	13	0	2	1	2	0
1.	Lurah	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	Sekretaris	1	1	0	0	0	0	0	0
3.	Kasi Pemerintahan	1	1	0	0	0	0	0	0
4.	Kasi Kemasyarakatan	0	1	1	0	0	0	0	0
5.	Kasi Pembangunan	1	1	0	0	0	0	0	0
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	3	1	0	2	0	0	0
7.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	2	2	0	0	0	0	0
8.	Pengelola Data dan Informasi	0	5	5	0	0	0	0	0
9.	Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	0	0	0	0	0
10.	Pengadministrasi Perkantoran	4	4	0	0	0	1	2	0
11.	Penata Laksana Barang Penyelia	0	1	1	0	0	0	0	0
12.	Penata Laksana Barang Mahir	0	1	1	0	0	0	0	0
13.	Penata Laksana Barang Terampil	0	1	1	0	0	0	0	0
	KELURAHAN PABAHANAN	13	23	10	2	0	2	0	0
1.	Lurah	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	Sekretaris	1	1	0	1	0	0	0	0
3.	Kasi Pemerintahan	1	1	0	1	0	0	0	0
4.	Kasi Kemasyarakatan	1	1	0	0	0	1	0	0
5.	Kasi Pembangunan	1	1	0	0	0	0	0	0
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	0	0	0	0	0	0
7.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	2	1	0	0	0	0	0
8.	Pengelola Data dan Informasi	0	5	5	0	0	0	0	0
9.	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0	0	0	0	0	0
10.	Pengadministrasi Perkantoran	3	4	1	0	0	1	0	0
11.	Penata Laksana Barang Penyelia	0	1	1	0	0	0	0	0
12.	Penata Laksana Barang Mahir	0	1	1	0	0	0	0	0
13.	Penata Laksana Barang Terampil	0	1	1	0	0	0	0	0
	KELURAHAN KARANG TARUNA	11	23	12	1	1	0	0	1
1.	Lurah	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	Sekretaris	1	1	0	1	0	0	0	0
3.	Kasi Pemerintahan	1	1	0	0	0	0	0	0

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi					
				Pegawai yang Dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.	Kasi Kemasyarakatan	1	1	0	0	1	0	0	0
5.	Kasi Pembangunan	1	1	0	0	0	0	0	0
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	3	1	0	0	0	0	0
7.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	2	1	0	0	0	0	0
8.	Pengelola Data dan Informasi	0	4	4	0	0	0	0	0
9.	Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	0	0	0	0	0
10.	Pengadministrasi Perkantoran	3	5	2	0	0	0	0	1
11.	Penata Laksana Barang Penyelia	0	1	1	0	0	0	0	0
12.	Penata Laksana Barang Mahir	0	1	1	0	0	0	0	0
13.	Penata Laksana Barang Terampil	0	1	1	0	0	0	0	0

Secara umum Kebutuhan ASN Kecamatan Pelaihari di proyeksikan meningkat, seiring dengan tingginya tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PELAIHARI

Produk layanan yang terdapat pada Kecamatan Pelaihari yaitu :

- a. Pelayanan Non Perijinan
 1. Rekomendasi Perizinan
 2. Rekomendasi Nikah
 3. Pengantar Pindah Domisili
 4. Pengantar KTP
 5. Pengantar Kartu Keluarga
 6. Legalisasi Permohonan Perizinan
 7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
 8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
 9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
 10. Legalisasi Proposal Bantuan
 11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
 12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
 13. Legalisasi Surat Kehilangan
 14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
 15. Legalisasi Permohonan Perizinan

b. Pelayanan Perijinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil
3. Izin Bilyard Non Komersil
4. Izin Playstation/Video Game

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelaihari

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-			Realisasasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	17	18
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari				87.5	88	88.5	95.59			109.24		
2	Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari				82	83	83	77.01			93.93		

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN KECAMATAN PELAIHARI

Untuk Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Pealihari adalah seluruh Masyarakat yang ada di 15 Desa dan 15 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pelaihari. Sebagai pendukung terlaksananya tujuan Perangkat Daerah, Kecamatan Pelaihari memiliki mitra pendukung, antara lain :

1. Seluruh Kepala Desa da Lurah beserta Jajarannya se Kecamatan Pelaihari
2. Kepala Satuan Polisi Sektor (Kapolsel) Pelaihari Beserta Seluruh Anggota
3. Komandan Rayon Militer (Danramil) Wilayah Kecamatan Pelaihari
4. Seluruh SKPD Lintas Sektor dan UPT yang ada di wilayah Kecamatan Pelaihari

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PELAIHARI

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN PELAIHARI

Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat di jumpai, antara lain :

1. Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan lokus dan fokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam IDM
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban

3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam memahami Standar Operasional Pelayanan
4. Kurangnya kapasitas dan keterampilan ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari dalam menggunakan Informasi Teknologi

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan uraian tentang gambaran Pelayanan yang telah ditelaah sesuai Visi Misi Kabupaten Tanah laut maka Kecamatan Pelaihari dapat menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan perencanaan & pelaksanaan pembangunan di desa
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Profesional dan akuntabel
5. Peningkatan Adaptasi teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 2.7. Teknik Menyimpulkan Isu Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Pembinaan Masyarakat Desa Kelurahan	Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan lokus dan fokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam IDM	Penyusunan RPJMDes dan RKPDes seringkali tidak memanfaatkan data ID secara optimal	Integrasi ID dengan SDGs Desa secara sistematis	Penguatan kebijakan terkait pembangunan di desa berbasis ID	Pembinaan Terpadu Berbasis Data	Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan perencanaan & pelaksanaan pembangunan di desa

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
2, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban					Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar
3, Optimalisasi Pelayanan Publik	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam memahami Standar Operasional Pelayanan					Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik
4, Potensi peningkatan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik di Kecamatan	Kurangnya kapasitas dan keterampilan ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari dalam menggunakan Informasi Teknologi	Penguatan Kapasitas ASN secara Sistematis	Digitalisasi dan Inklusi Digital	Penguatan kebijakan terkait peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Profesional dan akuntabel
						Peningkatan Adaptasi teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

BAB III

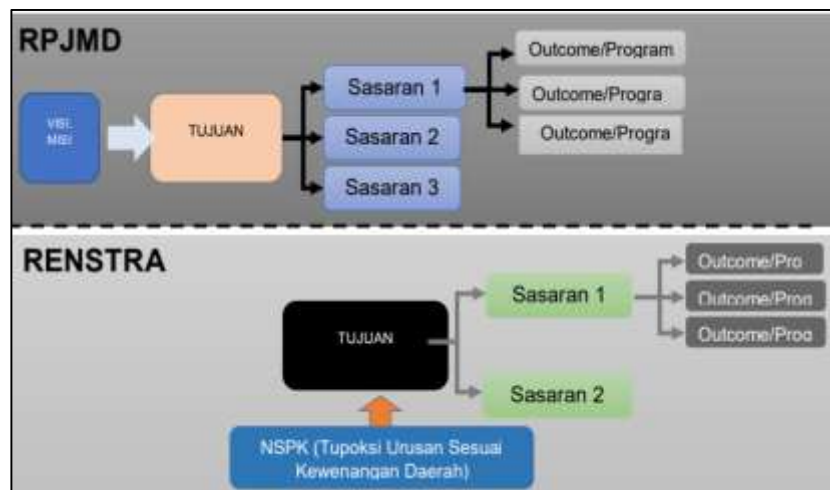
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PELAIHARI

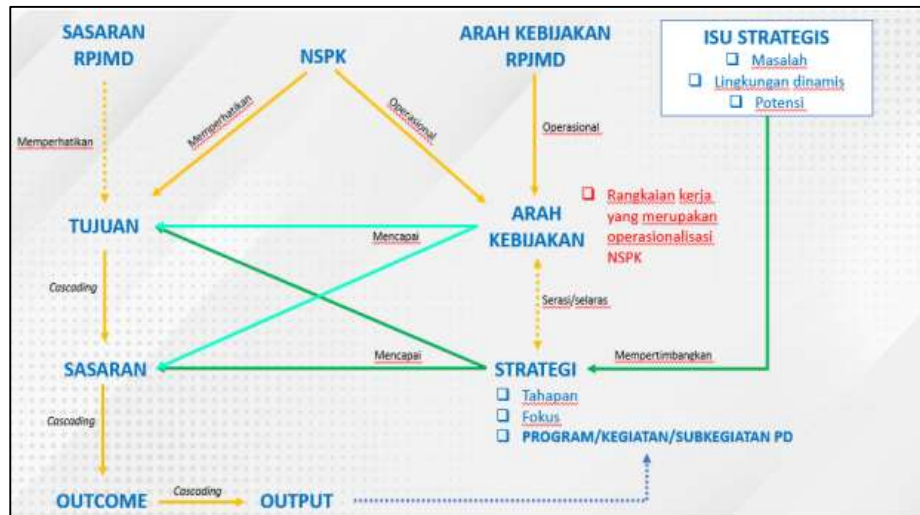
Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 dan berdasarkan potensi, isu- isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut .

Adapun konsep RPJMD tahun 2025-2029 adalah ***“BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”*** mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Tujuan Renstra Kecamatan Pelaihari tahun 2025-2029 adalah ***“MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN”***, tujuan ini menggambarkan upaya integritas dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan Pelaihari dalam efektifitas koordinasi pemerintahan, pemberdayaan wilayah, pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan kinerja.



Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Sasaran dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK: Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	60	67	67	67	73	73	80	
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik melalui peningkatan tata kelola pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat	95,59	88	95,60	95,70	95,75	95,80	95,85	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan,

serta isu-isu strategis pembangunan daerah;

- Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target- target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel. 3.2

Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Kecamatan Pelaihari

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri	Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri	Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri	Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri	Meningkatkan persentase desa mandiri
Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal	Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal	Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal	Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal	Meningkatkan Kualitas pelayanan yang ada di Kecamatan

Dalam rangka mencapai tujuan RPJMD tahun 2025-2029, maka diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan Kecamatan Pelaihari yang selaras dengan Misi 3 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis “ untuk memastikan keterkaitan kebijakan nasional, Daerah dan Perangkat Daerah secara sistematis.

Hasil Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pelaihari

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan pada lingkup kecamatan	Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

N0	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5
2.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020		Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh kecamatan sebagai perpanjangan tangan Bupati	Mendukung target rasio desa mandiri

Arah kebijakan RPJMD menjadi acuan dalam peningkatan penerapan good governance dengan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Dalam konteks ini Kecamatan Pelaihari melakukan sejumlah intervensi strategis yang dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4. Locus Kecamatan Pelaihari

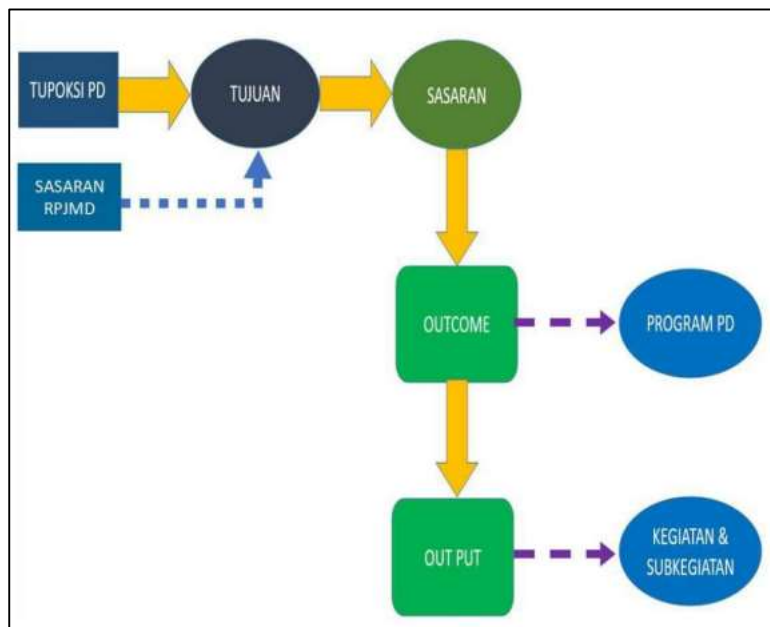
N0	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Pelaihari	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan partisipatif.	Lokus utama pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik wilayah Kecamatan Pelaihari

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersaji pada Tabel 4.3.



Tabel 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Renstra Kecamatan Pelaihari

NSPK DAN SASARAN RP JIMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Memingkatkan Fasilitas Pelayanan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
						Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RP JIMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	
						Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
					Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Persentase PPKS yang terfasilitasi		
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
				Memingkatkan Fasilitasi Pelayanan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RP JIMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik melalui peningkatan tata kelola pemerintahan				Meningkatnya desa yang tertib administrasi			
					Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Persentase Desa yang Tertib Administrasi		
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase objek pelayanan yang sesuai SOP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Persentase objek pelayanan yang sesuai SOP	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

Tabel 4.3. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Pelaihari

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN				22.969.974.228		21.641.856.948		22.308.490.188		23.349.863.528		24.320.521.566	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	77,01	78 Nilai	14.494.077.497	78 Nilai	15.308.041.888	78,05 Nilai	15.764.234.970	78,50 Nilai	16.518.320.830	79 Nilai	17.113.571.116	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari		100%	25.079.250	100%	35.532.213	100%	34.943.637	100%	36.916.000	100%	38.791.350	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	19.199.250	7 Dokumen	29.358.213	7 Dokumen	28.490.637	7 Dokumen	30.187.000	7 Dokumen	31.791.350	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	5.880.000	5 Laporan	6.174.000	5 Laporan	6.453.000	5 Laporan	6.729.000	5 Laporan	7.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari		100%	11.179.517.840	100%	11.743.002.675	100%	11.853.606.885	100%	12.412.436.916	100%	12.653.363.726	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		77 orang / bulan	11.169.533.500	77 orang / bulan	11.728.010.175	70 orang / bulan	11.837.300.635	70 orang / bulan	12.394.712.854	70 orang / bulan	12.634.524.961	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	9.984.340	12 Dokumen	14.992.500	12 Dokumen	16.306.250	12 Dokumen	17.724.062	12 Dokumen	18.838.765	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari		100%	95.154.000	100%	135.861.700	100%	194.921.300	100%	198.050.000	100%	233.500.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	41.154.000	1 Paket	56.861.700	1 Paket	79.921.300	1 Paket	71.050.000	1 Paket	113.500.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 orang	54.000.000,00	3 orang	79.000.000,00	3 orang	90.000.000,00	3 orang	127.000.000,00	3 orang	120.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	5 Orang	25.000.000,00	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari		100%	1.412.830.187	100%	1.341.793.300	100%	1.611.890.503	100%	1.752.112.715	100%	1.933.013.635	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 paket	22.000.000	7 paket	23.745.000	7 paket	29.253.750	7 paket	35.950.000	7 paket	39.935.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		36 paket	508.485.826	36 paket	478.146.800	36 paket	595.150.000	36 paket	632.650.000	36 paket	661.617.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		13 Paket	105.219.361	13 Paket	125.246.250	13 Paket	136.545.253	13 Paket	150.325.260	13 Paket	164.427.425	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	34.700.000	2 Paket	35.609.000	2 Paket	40.766.500	2 Paket	44.547.105	2 Paket	47.539.210	
Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.750.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	685.000.000	12 Laporan	611.750.000	12 Laporan	741.150.000	12 Laporan	814.450.000	12 Laporan	937.900.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 Dokumen	42.425.000	2 Dokumen	51.546.250	2 Dokumen	54.025.000	2 Dokumen	59.190.350	2 Dokumen	66.595.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari		100%	320.020.000	100%	425.571.000	100%	412.638.945	100%	408.239.289	100%	454.347.615	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	66.600.000	2 unit	69.930.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		26 Unit	136.420.000	26 Unit	218.141.000	26 Unit	233.638.945	26 Unit	210.139.289	26 Unit	253.042.615	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	42.000.000,00	2 Unit	55.000.000,00	2 Unit	55.000.000,00	2 Unit	70.000.000,00	2 Unit	75.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	75.000.000	1 Unit	82.500.000	1 Unit	94.000.000	1 Unit	98.100.000	1 Unit	96.305.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari		100%	1.106.166.220	100%	1.211.506.000	100%	1.219.533.700	100%	1.258.835.910	100%	1.314.609.229	
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	301.800.000	12 Laporan	283.487.500	12 Laporan	290.382.500	12 Laporan	302.628.250	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	856.166.220	12 Laporan	909.706.000	12 Laporan	936.046.200	12 Laporan	968.453.410	12 Laporan	1.011.980.979	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari		100%	355.310.000	100%	414.775.000	100%	436.700.000	100%	451.730.000	100%	485.945.561	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Bi aya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	30.000.000	1 unit	31.500.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 unit	262.500.000	6 unit	283.375.000	6 unit	298.675.000	6 unit	304.981.250	6 unit	330.323.124	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 unit	62.810.000	24 unit	74.900.000	24 unit	81.775.000	24 unit	89.248.750	24 unit	96.747.437	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	1 unit	25.000.000	1 unit	26.250.000,00	1 unit	27.500.000,00	1 unit	28.875.000,00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantar atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pelaihari	95,59 Nilai	95,60 Nilai	9.500.000	95,70 Nilai	9.975.000	95,75 Nilai	10.000.000	95,80 Nilai	10.250.000	95,85 Nilai	10.500.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang sesuai SOP		100%	9.500.000	100%	9.975.000	100%	10.000.000	100%	10.250.000	100%	10.500.000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Minimal di Wilayah Kecamatan Standar Pelayanan		4 Laporan	9.500.000	4 Laporan	9.975.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.250.000	4 Laporan	10.500.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang sesuai SOP		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri	60	67	5.364.154.086	67	5.763.510.000	73	5.903.756.153	73	6.135.445.311	80	6.469.073.656	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat		100%	40.400.000	100%	42.420.000	100%	45.000.000	100%	45.250.000	100%	45.500.000	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	40.400.000	12 Laporan	42.420.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	45.250.000	12 Laporan	45.500.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat		100%	5.323.754.086,00	100%	5.721.090.000,00	100%	5.858.756.153,00	100%	6.090.195.311,00	100%	6.423.573.656,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		10 Lembaga Kemasyara katan	43.852.833,00	10 Lembaga Kemasyara katan	62.750.000,00	10 Lembaga Kemasyara katan	60.524.153,00	10 Lembaga Kemasyara katan	64.875.361,00	10 Lembaga Kemasyarakat an	138.338.258,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	1.889.635.848,00	8 Unit	2.150.040.000,00	8 Unit	2.176.792.000,00	8 Unit	2.225.440.800,00	8 Unit	2.332.425.680,00	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas/Or mas	1.750.000.000,00	8 Pokmas/Or mas	1.782.300.000,00	8 Pokmas/Or mas	1.821.585.000,00	8 Pokmas/Or mas	1.924.578.500,00	8 Pokmas/Orma s	1.997.053.354,00	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		13 Laporan	1.640.265.405,00	13 Laporan	1.726.000.000,00	13 Laporan	1.799.855.000,00	13 Laporan	1.875.300.650,00	13 Laporan	1.955.756.364,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Mandiri	60	67	46.000.000	67	48.300.000	73	48.500.000	73	48.750.000	80	50.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani		2	46.000.000	2	48.300.000	2	48.500.000	2	48.750.000	2	50.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		3 Laporan	46.000.000	3 Laporan	48.300.000	2 Laporan	48.500.000	2 Laporan	48.750.000	2 Laporan	50.000.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Mandiri	60	67	2.958.928.302	67	409.850.000	73	460.350.000	73	512.000.000	80	565.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase PPKS yang terfasilitasi		100%	2.958.928.302	100%	409.850.000	100%	460.350.000	100%	512.000.000	100%	565.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitasi keamanan lokal regional dan nasional		1000 orang	2.901.928.302	1000 orang	350.000.000	1000 orang	400.000.000	1000 orang	450.000.000	1000 orang	500.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		8 dokumen	57.000.000	8 dokumen	59.850.000	10 dokumen	60.350.000	10 dokumen	62.000.000	10 dokumen	65.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri	60	67	97.314.343	67	102.180.060	73	121.649.065	73	125.097.387	80	112.376.794	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu		100%	97.314.343	100%	102.180.060	100%	121.649.065	100%	125.097.387	100%	112.376.794	
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi												
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen	66.503.322	1 Dokumen	69.828.488	1 Dokumen	72.713.098	1 Dokumen	74.531.890	1 Dokumen	75.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		15 dokumen	5.811.021	15 dokumen	6.101.572	15 dokumen	6.435.967	15 dokumen	6.815.497	15 dokumen	7.376.794	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa												
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	-	-	-	-	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	26.250.000	2 dokumen	27.500.000	2 dokumen	28.750.000	2 dokumen	30.000.000	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		-	-	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	-	-	

Terkait dengan Janji Politis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diusung dalam visi dan misi kedalam program Unggulan Daerah atau Prioritas Pembangunan. Hibah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 1 (satu) Milyar per kecamatan masih menjadi program unggulan. Dan Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan bagi Ketua RT/RW. Untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Kecamatan Pelaihari Dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET	
1	2	4	5	6	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Evaluasi Kelurahan		
			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Indikator kinerja yang di gunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja Kecamatan Pelaihari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pelaihari dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kecamatan Pelaihari

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Desa Mandiri	persen	67.00	67.00	67.00	73.00	73.00	80.00	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari	Nilai	88	88	88,05	88,50	88,75	88,90	
3	Nilai AKIP Kecamatan Pelaihari	Nilai	83.00	78.00	78,05	78,50	79.00	79.00	

BAB V PENUTUP

Rencana Stretegis ini adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pelaihari untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Pelaihari dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapaiya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Tanah Laut. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Pelaihari ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Pelaihari.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Pelaihari serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Tanah Laut. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Pelaihari merupakan solusi paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Pelaihari dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Pelaihari.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Pelaihari yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Pelaihari harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pelaihari. Laporan Kinerja (LKj) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Pelaihari di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Pelaihari ini.

Camat Pelaihari,

AGUS SETIYO, SSTP,MM
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19850808 200412 1 001